

Empat Satker Kemenag Raih Penghargaan Pengelola SBSN Terbaik

Jakarta (Kemenag) --- Empat Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan. Keempatnya dinilai memiliki capaian kinerja terbaik dalam pengelolaan proyek yang dibiayai dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2019.

Keempat satker tersebut adalah Asrama Haji Provinsi Bangka Belitung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Hamahera Barat, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta.

Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman dalam Kegiatan Forum Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun 2020 yang berlangsung di Auditorium Ditjen PPR, Kemenkeu, Kamis (23/01).

Forum koordinasi ini diikuti sembilan Kementerian/Lembaga. Selain Kemenag, hadir juga perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hadir juga, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Muharam, serta perwakilan empat satker Kemenag yang menerima penghargaan.

“Jadi hari ini kita rapat koordinasi, yang pada intinya melakukan evaluasi 2019. Apa yang baik yang bisa kita teruskan dan apa yang menjadi kekurangan, kita bicarakan bersama. Termasuk juga kita memberikan penghargaan. Ada 10 satker yang kita beri penghargaan, karena berkinerja paling bagus dalam pengelolaan proyek SBSN’, jelas Luky Alfirman.

Menurutnya, pada tahun 2019, melalui SBSN, telah dilakukan pembiayaan proyek infrastruktur pada tujuh Kementerian/ Lembaga dengan nilai pembiayaan sebesar Rp28,43 triliun yang tersebar di 619 proyek. Untuk tahun 2020, pembiayaan melalui SBSN dialokasikan sebesar Rp27,35 triliun pada 8 Kementerian/Lembaga yang tersebar di 728 proyek.

“Nilainya tahun 2020 sebesar Rp27,35 triliun untuk 8 Kementerian/Lembaga dengan 728 proyek yang dibiayai oleh SBSN,” jelasnya.

Dalam acara ini, Kementerian/Lembaga yang hadir diminta memaparkan proyek yang dibiayai SBSN pada instansi masing-masing. Ketua Tim Kementerian Agama adalah Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin. Dia menjelaskan bahwa proyek SBSN pada Kemenag bertujuan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana serta memenuhi kebutuhan layanan dasar kehidupan beragama yang lebih baik. Ia pun menjelaskan, proyek yang biayai SBSN telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas layanan pada Asrama Haji, KUA dan Pendidikan Madrasah serta PTKIN.

Dikatakan Kamaruddin, tujuan proyek SBSN pada Kementerian Agama, pertama mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, memenuhi kebutuhan layanan dasar kehidupan beragama yang lebih baik.--

Selain itu, proyek yang biayai SBSN juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat, ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri, meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan KUA dan meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Madrasah dan PTKIN.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, mengaku bangga atas prestasi Kemenag. Penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara unit eselon 1 pusat sebagai pemrakarsa proyek dan satker di wilayah sebagai pelaksana.

Muhajirin berharap penghargaan ini, dapat menjadi pemacu satker lain yang akan mengelola proyek SBSN, khususnya pada pembangunan Asrama Haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

"Penghargaan ini tentunya hasil kerja bersama, lalu ada komitmen yang kuat dari pelaksana proyek dalam hal ini Kantor Kementerian Wilayah, khususnya pada pembangunan asrama haji. Ini tentu diharapkan dapat memacu kawan-kawan yang lain yang juga dipercaya mengelola proyek SBSN untuk asrama haji maupun untuk PLHUT. Dan ini salah satu upaya untuk kita agar semua pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Kalau pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentu kita perlu berbangga karena ini terus dinilai dan dipantau, bukan hanya oleh Kementerian Agama tapi oleh Kementerian dan Lembaga lain," tandasnya. (Yusuf Prasetyo)

Sumber : -<https://kemenag.go.id/berita/read/512632/empat-satker-kemenag-raih-penghargaan-pengelola-sbsn-terbaik>



Menag Ingatkan Pimpinan PTKIN Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi menerima 40 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menag mengingatkan agar PTKIN fokus mencetak generasi yang unggul dan bernasionalisme tinggi.

“Kita lahirkan pemimpin-pemimpin nantinya yang memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang terpuji, dan tentu mencintai bangsa dan negara,” ucap Menag di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/01).

Menag juga minta dana negara yang didistribusikan untuk PTKIN dikelola dengan baik agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai aturan. “Presiden berpesan, uang ini kita cari dengan susah payah, saya harapkan betul-betul jangan ada kebocoran, dimanfaatkan dengan baik dan betul-betul ada hasilnya,” ujar Menag.

Menag mengaku akan mengundang para pemenang tender pembangunan UIN. Menag akan menegaskan bahwa terpilihnya mereka sebagai pemenang lelang bukan karena siapa-siapa, tapi melalui proses yang terbuka dan sesuai ketentuan.

“Pemenang lelang tidak berhutang budi sedikit pun kepada saya sebagai Menteri Agama, Dirjen-Dirjen, dan pejabat lainnya. Pemenang lelang tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Tapi mereka berhutang budi kepada bangsa ini,” tegas Menag.

Ketua Forum Rektor Babun Suharto, berharap ada pemerataan alokasi dana SBSN ke seluruh PTKIN. Menurutnya, dana SBSN yang sudah berjalan lima tahun belakangan amat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan PTKIN.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar hasilnya maksimal bagi kemajuan PTKIN.

Sumber : -

Penulis : Bella

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512631/menag-ingatkan-pimpinan-ptkin-cetak-generasi-unggul-dan-nasionalis>



Sampai Akhir 2019, 768 Jurnal PTKI sudah Terakreditasi

Jakarta (Kemenag) --- Jumlah jurnal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terakreditasi terus mengalami peningkatan. Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag mencatat, sampai 2019, sudah ada 768 jurnal PTKI yang terakreditasi.

Angka ini meningkat signifikan dibanding data akhir tahun 2018 yang baru mencapai 305 jurnal. "Jurnal merupakan pilar penting dalam mengukur indikator kualitas perguruan tinggi. Ia merupakan corong atas hasil temuan riset, di samping pergolakan wacana dan diskursus keilmuan yang berkembang di lingkungan kampus," terang Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, di Jakarta, Kamis (23/01).

"Oleh karenanya, jurnal menjadi instrumen penting dalam mendiseminasikan hasil-hasil riset yang sekaligus menjadi media dakwah keilmuan di lingkungan perguruan tinggi," lanjutnya.

Menurut guru besar UIN Alauddin Makassar ini, pembenahan kualitas perguruan tinggi harus berorientasi pada peningkatan kualitas jurnal. Sebab, networking, produktivitas keilmuan, dan kualitas riset dapat diukur dari jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi. "Saya mendorong kepada seluruh pimpinan PTKI untuk memperhatikan terhadap jurnal di masing-masing kampus sehingga bisa lebih berkualitas lagi," pesannya.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, mengapresiasi kinerja pimpinan PTKI yang telah meraih prestasi gemilang di bidang jurnal ini. Senada dengan Kamaruddin, Arskal menilai jurnal memiliki makna strategis bagi perkembangan PTKI. Di samping sebagai sarana dalam mendiskusikan wacana keilmuan, jurnal juga menjadi persyaratan mutlak dalam melengkapi borang-borang akreditasi perguruan tinggi dan penilaian angka kredit dosen.

"Oleh karenanya, perairan jurnal yang terakreditasi ini sangat penting," tegasnya.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Suwendi, melaporkan, dalam dua tahun terakhir terjadi lompatan peningkatan yang sangat tajam terkait jumlah jurnal yang terakreditasi. Di akhir tahun 2017, baru terdapat 68 jurnal terakreditasi. Angka ini naik signifikan pada 2018 menjadi 305 jurnal. Akhir tahun 2019, jumlahnya bertambah lagi menjadi 768 jurnal.

"Jurnal terakreditasi pada Sinta-1 sebanyak 5 jurnal, Sinta-2 sebanyak 132 jurnal, Sinta-3 sebanyak 174 jurnal, Sinta-4 sebanyak 259 jurnal, Sinta-5 sebanyak 171 jurnal, dan Sinta-6 sebanyak 27 jurnal," jelas Suwendi.

Menurut doktor Pendidikan Islam jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini, akreditasi ini didasarkan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah yang merujuk pada Sinta (Science and Technology Index). Yaitu, portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.

Adapun jurnal yang tergabung dalam portal moraref.kemenag.go.id saat ini telah mencapai 1.724 jurnal dengan jumlah artikel sebanyak 50.290 buah.

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512628/sampai-akhir-2019--768-jurnal-ptki-sudah-terakreditasi>

Diskusi Relasi Agama-Negara, Menag Bicara Kesepakatan, Toleransi dan Keadilan

Ciputat (Kemenag) --- Menteri Agama didaulat sebagai pembicara kunci pada Rountable Discussion tentang "Pasang Surut Relasi Agama dan Negara". Diskusi ini digelar Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah di Ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah.

Hadir sebagai narasumber: Prof. Amelia Fauzia, P.Hd (Guru Besar Sejarah), Burhanuddin Muhtadi, P.Hd (Direktur Eksekutif Indikator Politik), Prof. Dr. Euis Amelia, M.Ag (Ketua Prodi S3 FEB), Ahmad Najib Burhani, P.Hd (Peneliti Bidang Humaniora, LIPI), Mustholih Siradj, MH (Advokat dan Kurator), Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia), dan Andi Syafrani, MCCL (Pengacara).

Di hadapan para alumni UIN, Menag berbicara tentang pentingnya kesepakatan, toleransi, dan penegakkan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara. Ketiga hal ini, kata Menag, terinspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saat membangun Madinah. Menurut Menag, Rasul bersama masyarakat Madinah yang majemuk membangun kesepakatan berupa Piagam Madinah, lalu mewujudkannya dalam kehidupan yang toleran dan berkeadilan.

"Ada kesepakatan, anjuran toleransi, dan penegakkan keadilan. Ini nilai yang diajarkan Rasulullah saat membangun Madinah," ujar Menag di Ciputat, Kamis (24/01).

Menurut Menag, dalam konteks Indonesia, Pancasila juga hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Karenanya, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan yang penuh toleransi dan berkeadilan.

Dalam kesempatan ini, Menag juga berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi di negara arab, khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, Menag melihat ada penguatan relasi antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Hal itu tertuang dalam visi Arab Saudi 2030, di mana penguatan keduanya berada dalam satu kotak yang sama, tidak dipisahkan. Saudi punya pengalaman kurang baik saat memisahkan identitas kebangsaan dan keagamaan.

"Saudi saat ini tidak mau memisahkan lagi antara identitas keislaman dan kebangsaan," ujarnya.

"Indonesia dari dulu sudah begitu, membangun wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi sebuah paket yang tidak terpisahkan," tambahnya.

Menag juga bercerita tentang perkembangan moderasi beragama di Uni Emirate Arab. Toleransi menjadi nilai yang dikedepankan hingga banyak sekali wisatawan dan investor yang datang ke sana.

"Wisatawan tidak akan datang kalau masyarakat tidak toleran. Toleransi terus dikampanyekan, tapi hal itu tidak menghilangkan identitas keislaman di sana," terangnya.

Menag menegaskan bahwa apa yang diceritakan terkair perubahan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan berarti akan diterapkan di Indonesia. Namun informasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam upaya terus merawat kerukunan dan relasi agama-negara di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Rountable Discussion Sukron Kamil menjelaskan bahwa tema relasi agama-negara diangkat seiring munculnya penguatan nilai keagamaan di masyarakat namun integrasinya dengan negara dirasa masih kurang nampak. "Hal ini yang akan didiskusikan," ujarnya. --

Sementara Ketua IKALUNI Ahmad Zacky Siradj menggarisbawahi catatan sejarah bahwa agama selalu mewarnai peradaban umat dan tata kelola kenegaraan. Menurutnya, kunci peradaban bisa bertahan karena sikap moral dan karakter agama masuk dalam wilayah peradaban. Dia berharap di Indonesia bisa terwujud agama yang berperadaban dan negara yang berkeadaban.

Mewakili Raktor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Andi Faisal menyampaikan bahwa alumni UIN Syarif Hidayatullah sudah mencapai lebih dari 80ribu. Jumlah ini tersebar di seluruh nusantara, dan sejumlah negara Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan Afrika.

"UIN Syarif Hidayatullah setiap tahun menggelar empat kali wisuda, dan satu kali momen berlangsung dua hari. Karena auditoriumnya hanya muat seribu lima ratus orang," ucapnya.

"Semoga ke depan auditorium bisa diperluas hingga menampung empat ribu orang sehingga wisudanya cukup dua kali setahun," harapnya.

Tampak hadir, Ketua Senat UIN Prof Abudin Nata, Sekretaris Senat Prof Armai Arief, Prof Zainun Kamal, Prof Amin Suma, para dekan dan dosen, serta Sekretaris Menteri (Sesmen) Khairul Huda Basyir yang juga sedang menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah.

Sumber : -

Penulis : Khoiron

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512626/diskusi-relasi-agama-negara--menag-bicara-kesepakatan--toleransi-dan-keadilan>



Program Penceramah Bersertifikat, Menag: Yang Mau, Silakan Ikut

Batam (Kemenag) --- Kementerian Agama akan melaksanakan program penceramah bersertifikat. Namun, Menteri Agama Fachrul Razi menekankan program ini tidak mengikat dan bersifat opsional.

"Dalam waktu dekat kita akan mengadakan program penceramah bersertifikat. Program ini tidak mengikat. Bagi yang mau silahkan ikut dan yang tidak mau tidak apa apa," ujar Menag, di Batam, Selasa (21/01).

Program yang sudah mulai dibahas sejak 2019 lalu ini, sejatinya menurut Menag bertujuan membekali para penceramah untuk lebih mengenal Pancasila dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dalam program ini, Kementerian Agama akan melibatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," jelas Menag.

Menag Fachrul Razi menargetkan proses penyempurnaan program penceramah bersertifikat ini akan selesai bulan depan. "Program ini masih disempurnakan. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai," kata Menag.

Sementara, ditemui terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tarmizi Tohor mengatakan program pelatihan penceramah bersertifikat Kementerian Agama bertujuan untuk mencetak kader pendakwah berkarakter moderat, saling menghargai di tengah kemajemukan Indonesia.

Tohor menyampaikan, pada Maret 2019, Kemenag bersama dengan MUI telah menggelar Penguatan Kader Muballigh Tingkat Nasional 2019. Gelaran yang mengusung tema "Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" ini, diikuti oleh perwakilan MUI dari seluruh provinsi di Indonesia. "Saat itu, tiap provinsi mengutus tiga peserta, terdiri dari dua muballigh, dan satu muballighah. Khusus Provinsi DKI Jakarta, ada tujuh peserta yang terdiri dari empat muballigh, dan tiga muballighah," jelasnya.

Sebelumnya, pada 2018 Kemenag juga melaksanakan kegiatan serupa bertajuk Pelatihan Calon Dai Muda (PCDMI). Tarmizi Tohor berharap, dengan melakukan evaluasi program-program serupa di tahun sebelumnya, program penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan tahun ini akan memberikan hasil yang lebih baik.

Program Penceramah Bersertifikat rencananya akan dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). "Pengkaderan lewat bimtek ini diharapkan dapat melahirkan muballigh yang benar-benar bisa menyampaikan Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Sehingga dapat meningkatkan moderasi kehidupan beragama dan berbangsa," tutur Tarmizi.

Tarmizi menambahkan program pengkaderan para penceramah bersertifikat ini bertujuan untuk penguatan sekaligus terjaminnya ketersediaan sumber daya dai dengan wawasan kebangsaan yang baik. "Sehingga, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran agama," ujar Tarmizi.

"Usai mengikuti bimtek para penceramah agama mendapat sertifikat," tandas Tarmizi Tohor.

Sumber : -<https://kemenag.go.id/berita/read/512625/program-penceramah-bersertifikat--menag--yang-mau--silakan-ikut>

Menag Fachrul Razi : Program Penceramah Bersertifikat Tidak Wajib

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Agama akan melaksanakan program penceramah bersertifikat. Namun, Menteri Agama Fachrul Razi menekankan program ini tidak mengikat dan bersifat opsional.

Fachrul mengatakan program yang mulai dibahas 2019 itu bertujuan membekali para penceramah untuk lebih nasionalis.

Kementerian Agama akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Bagi yang mau, silakan ikut dan yang tidak mau tidak apa-apa," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/1/2020).

Fachrul menargetkan proses penyempurnaan program penceramah bersertifikat ini akan selesai bulan depan.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tarmizi Tohor mengatakan program pelatihan penceramah bersertifikat Kemenag bertujuan mencetak kader pendakwah berkarakter moderat dan saling menghargai di tengah kemajemukan Indonesia.

Program penceramah bersertifikat akan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek). Tarmizi menuturakan pengkaderan lewat bimtek diharapkan dapat melahirkan mubalig yang benar-benar bisa menyampaikan Islam untuk meningkatkan moderasi kehidupan beragama dan berbangsa.

Menurut dia, program pengkaderan para penceramah bersertifikat bertujuan menguatkan dan menjamin ketersediaan sumber daya dai dengan wawasan kebangsaan yang baik.

"Dengan demikian, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran agama," ujar Tarmizi.

Sumber : <https://kabar24.bisnis.com/read/20200123/15/1193395/menag-fachrul-razi-program-penceramah-bersertifikat-tidak-wajib>

Kabar24 NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL HUMANIORA INFO

Menag Fachrul Razi : Program Penceramah Bersertifikat Tidak Wajib

Kementerian Agama akan melaksanakan program penceramah bersertifikat. Namun, Menteri Agama Fachrul Razi menekankan program ini tidak mengikat dan bersifat opsional.

Sri Mas Sari - Bisnis.com
23 Januari 2020 | 20:15 WIB

Hot Topic

- #Donald Trump
Rahasia Anggota Senat
Sanggup Berjam-jam Ikuti
Sidang...
- #cpns
CPNS Jabar : 37.985 Peserta
Bakal Ikuti Seleksi
Kompetensi...
- #Premium Content
Jalan Berbatu yang Mengadang
Emiten Otomotif
- #Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Pemulihan Banjir Bandang
Lebak, KLHK Kerahkan 3 Dirjen

Kemenag: Belum Ada Rencana Seragamkan Khutbah Jumat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan Kemenag belum punya rencana untuk mengatur materi khutbah.

Namun dia memberikan contoh yaitu materi khutbah di Uni Emirat Arab diatur. "Oh nggak, belum ada kita. Belum ada wacana itu. Cuma saya ceritakan mengapa, mengapa mereka (UEA) seperti itu (mengatur materi khutbah), karena punya pengalaman radikalisme yang luar biasa, mencabik-cabik negaranya. Sehingga dilakukan seperti itu," kata dia usai membuka diskusi di kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/1).

Dalam kesempatan itu, Menag Fachrul menegaskan pihaknya tidak punya niatan mengatur materi khutbah. "Nggak.. nggak..," kata dia sebelum meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar menyebut bahwa Kementerian Agama Kota Bandung berencana mengatur isi khutbah shalat Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Wacana tersebut, mengacu pada Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Kota Abu Dhabi, kata Yusuf, mengatur khutbah Jumat agar bersama-sama mendoakan pemerintah dalam setiap urusan. Selain itu, diaturnya isi pidato khotbah Jumat agar dapat menyejukkan jamaah sidang Jumat.

"Ini dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur," kata Yusuf.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/20/01/23/q4k53j320-kemenag-belum-ada-rencana-seragamkan-khutbah-jumat>

Menag Jelaskan Alasan Munculnya Wacana Atur Khutbah Jumat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menanggapi soal wacana kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bandung yang akan mengatur materi khutbah. Dia mengaku bahwa Kemenag pusat belum punya wacana untuk mengatur materi khutbah. Namun dia menjelaskan alasan mengapa wacana pengaturan khutbah di Bandung itu muncul.

"Oh *gak*, belum ada kita. Belum ada wacana itu. Cuma saya ceritakan kenapa, kenapa mereka (Uni Emirat Arab) seperti itu (mengatur materi khutbah), karena punya pengalaman radikalisme yang luar biasa, mencabik-cabik negaranya. Sehingga dilakukan seperti itu," kata dia usai membuka diskusi di kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/1).

Dalam kesempatan itu, Menag Fachrul menegaskan pihaknya tidak punya niat mengatur materi khutbah. "*Gak.. gak..*," kata dia sebelum meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar menyebut bahwa Kementerian Agama Kota Bandung berencana mengatur isi khotbah shalat Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Wacana tersebut, mengacu pada Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Kota Abu Dhabi, kata Yusuf, mengatur khutbah Jumat agar bersama-sama mendoakan pemerintah dalam setiap urusan. Selain itu, diaturnya isi pidato khotbah Jumat agar dapat menyejukkan jamaah sidang Jumat.

"Ini dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi *baldatun toyibatun wa robun gofur*," kata Yusuf.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/q4k3df430/menag-jelaskan-alasan-munculnya-wacana-atur-khutbah-jumat>



Harapan Menag Pimpinan PTKIN Harus Bisa Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis

JAKARTA, PRIPOS.ID (23/1/2020) – Menteri Agama Fachrul Razi menerima 40 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menag mengingatkan agar PTKIN fokus mencetak generasi yang unggul dan bernasionalisme tinggi.

“Kita lahirkan pemimpin-pemimpin nantinya yang memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang terpuji, dan tentu mencintai bangsa dan negara,” ucap Menag di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/01).

Menag juga minta dana negara yang didistribusikan untuk PTKIN dikelola dengan baik agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai aturan. “Presiden berpesan, uang ini kita cari dengan susah payah, saya harapkan betul-betul jangan ada kebocoran, dimanfaatkan dengan baik dan betul-betul ada hasilnya,” ujar Menag.

Menag mengaku akan mengundang para pemenang tender pembangunan UIN. Menag akan menegaskan bahwa terpilihnya mereka sebagai pemenang lelang bukan karena siapa-siapa, tapi melalui proses yang terbuka dan sesuai ketentuan.

“Pemenang lelang tidak berhutang budi sedikit pun kepada saya sebagai Menteri Agama, Dirjen-Dirjen, dan pejabat lainnya. Pemenang lelang tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Tapi mereka berhutang budi kepada bangsa ini,” tegas Menag.

Ketua Forum Rektor Babun Suharto, berharap ada pemerataan alokasi dana SBSN ke seluruh PTKIN. Menurutnya, dana SBSN yang sudah berjalan lima tahun belakangan amat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan PTKIN.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar hasilnya maksimal bagi kemajuan PTKIN.(bela/ask)

Sumber : <https://pripos.id/harapan-menag-pimpinan-ptkin-harus-bisa-cetak-generasi-unggul-dan-nasionalis/>

The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** Multiple tabs are open, including YouTube, kemenag, Menag In, and the current article page.
- Address Bar:** Shows the URL <https://pripos.id/harapan-menag-pimpinan-ptkin-harus-bisa-cetak-generasi-unggul-dan-nasionalis/>.
- Page Header:** Features the logo for PRIPOS.ID with the tagline "Menjalin Kemitraan". A navigation menu includes links for HOME, BERITA NASIONAL, ARTIKEL, EKONOMI DAN BISNIS, BERITA DAERAH, HIBURAN DAN GAYA HIDUP, and IPEKNI. A search icon is also present.
- Breadcrumbs:** The path "YOU ARE AT Home > Agama > Harapan Menag Pimpinan PTKIN Harus Bisa Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis" is shown.
- Main Content:** A large photograph of a meeting room with several people seated around a long table. Below the photo is the caption "(foto: Danyl)". The article title "Harapan Menag Pimpinan PTKIN Harus Bisa Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis" is displayed below the image.
- Right Sidebar:** Contains a search bar, an advertisement for "PASANG IKLAN 400 X 267 PX", and a "BERITA TERBARU" section. The latest news item is titled "Teknologi yang Membawa Dampak Positif di World Economic Forum" and is dated "JAN 23, 2020" from the source "pripos.id".
- Taskbar:** The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating the time as 10:09 on 1/24/2020.

Kemenag Buka Lagi Seleksi Calon Mahasiswa S1 untuk Timur Tengah

Jakarta - Kementerian Agama RI kembali membuka seleksi calon mahasiswa S1 untuk kuliah di Timur Tengah untuk program beasiswa dan non beasiswa. Ada 3 negara tujuan yaitu Mesir, Sudan, dan Maroko.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kemenag Arskal Salim mengatakan, proses seleksi rencananya akan dilaksanakan pada April 2020. Ada 160 kuota beasiswa S1 Mesir yang terdistribusi dalam 4 jalur, yaitu Kemenag 20 orang, Kedutaan Mesir 30, Pondok Pesantren Gontor 80, dan sementara kuota untuk beasiswa dari Sudan dan Maroko, diperkirakan masing-masing 20 orang.

Tahun 2020, Arskal meminta seleksi tetap berbasis komputer dengan lokal koneksi. Jadwal pelaksanaan seleksi tidak serentak, tapi dengan waktu berbeda antar satuan kerja penyelenggara. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada peserta dalam memilih beberapa alternatif pilihan lokasi.

"Kita harus menggali seluruh potensi yang kita miliki untuk menghasilkan hasil seleksi yang berkualitas yang akan membanggakan di masa yang akan datang," kata Arskal seperti keterangan yang dikutip dari laman Kemenag RI.

Nantinya, selain tes tulis berbasis komputer dilakukan juga proses wawancara. Melalui wawancara diharapkan dapat menggali dan memastikan calon mahasiswa baru ke Timur Tengah ini terbebas dari ekstrimisme yang menentang ideologi negara. Sebab komitmen kebangsaan harus menjadi bagian terpenting dalam proses seleksi ini sehingga para mahasiswa yang kembali ke Indonesia tetapi menjadi penjara ajaran Islam yang moderat.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Kemenag M. Adib Abdushomad mengatakan seleksi calon mahasiswa ini bertujuan untuk menyaring lulusan Madrasah Aliyah/Pondok Pesantren atau sekolah potensial untuk mengikuti studi ke negara Timur Tengah. Tujuan lainnya, mempersiapkan generasi terbaik dalam bidang ilmu keislaman dan Bahasa Arab dalam rangka melahirkan calon ilmuwan yang mumpuni dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai.

Menurut Adib, untuk model seleksi tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Waktu pelaksanaan tidak dilakukan secara bersamaan namun akan dilakukan dengan waktu dan soal yang berbeda di masing-masing lokasi. Untuk detail jadwal akan diumumkan menyusul.

(erd/erd)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-4870775/kemenag-buka-lagi-seleksi-calon-mahasiswa-s1-untuk-timur-tengah>



Diskusi Relasi Agama-Negara, Menag Bicara Kesepakatan, Toleransi dan Keadilan

Ciputat (ikhlasberamalnews) — Menteri Agama didaulat sebagai pembicara kunci pada Rountable Discussion tentang “Pasang Surut Relasi Agama dan Negara”. Diskusi ini digelar Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah di Ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah.

Hadir sebagai narasumber: Prof. Amelia Fauzia, P.Hd (Guru Besar Sejarah), Burhanuddin Muhtadi, P.Hd (Direktur Eksekutif Indikator Politik), Prof. Dr. Euis Amelia, M.Ag (Ketua Prodi S3 FEB), Ahmad Najib Burhani, P.Hd (Peneliti Bidang Humaniora, LIPI), Mustholih Siradj, MH (Advokat dan Kurator), Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia), dan Andi Syafrani, MCCL (Pengacara).

Di hadapan para alumni UIN, Menag berbicara tentang pentingnya kesepakatan, toleransi, dan penegakkan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara. Ketiga hal ini, kata Menag, terinspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saat membangun Madinah. Menurut Menag, Rasul bersama masyarakat Madinah yang majemuk membangun kesepakatan berupa Piagam Madinah, lalu mewujudkannya dalam kehidupan yang toleran dan berkeadilan.

“Ada kesepakatan, anjuran toleransi, dan penegakkan keadilan. Ini nilai yang diajarkan Rasulullah saat membangun Madinah,” ujar Menag di Ciputat, Kamis (24/01).

Dalam kesempatan ini, Menag juga berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi di negara arab, khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, Menag melihat ada penguatan relasi antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Hal itu tertuang dalam visi Arab Saudi 2030, di mana penguatan keduanya berada dalam satu kotak yang sama, tidak dipisahkan. Saudi punya pengalaman kurang baik saat memisahkan identitas kebangsaan dan keagamaan.

“Saudi saat ini tidak mau memisahkan lagi antara identitas keislaman dan kebangsaan,” ujarnya.

“Indonesia dari dulu sudah begitu, membangun wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi sebuah paket yang tidak terpisahkan,” tambahnya.

Menag juga bercerita tentang perkembangan moderasi beragama di Uni Emirate Arab. Toleransi menjadi nilai yang dikedepankan hingga banyak sekali wisatawan dan investor yang datang ke sana.

“Wisatawan tidak akan datang kalau masyarakat tidak toleran. Toleransi terus dikampanyekan, tapi hal itu tidak menghilangkan identitas keislaman di sana,” terangnya.

Menag menegaskan bahwa apa yang diceritakan terkait perubahan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan berarti akan diterapkan di Indonesia. Namun informasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam upaya terus merawat kerukunan dan relasi agama-negara di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Rountable Discussion Sukron Kamil menjelaskan bahwa tema relasi agama-negara diangkat seiring munculnya penguatan nilai keagamaan di masyarakat namun integrasinya dengan negara dirasa masih kurang nampak. “Hal ini yang akan didiskusikan,” ujarnya.

Sementara Ketua IKALUNI Ahmad Zacky Siradj menggarisbawahi catatan sejarah bahwa agama selalu mewarnai peradaban umat dan tata kelola kenegaraan. Menurutnya, kunci peradaban bisa bertahan karena sikap moral dan karakter agama masuk dalam wilayah peradaban. Dia berharap di Indonesia bisa terwujud agama yang berperadaban dan negara yang berkeadaban.

Mewakili Raktor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Andi Faisal menyampaikan bahwa alumni UIN Syarif Hidayatullah sudah mencapai lebih dari 80ribu. Jumlah ini tersebar di seluruh nusantara, dan sejumlah negara Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan Afrika.

“UIN Syarif Hidayatullah setiap tahun menggelar empat kali wisuda, dan satu kali momen berlangsung dua hari. Karena auditoriumnya hanya muat seribu lima ratus orang,” ucapnya.

“Semoga ke depan auditorium bisa diperluas hingga menampung empat ribu orang sehingga wisudanya cukup dua kali setahun,” harapnya.

Tampak hadir, Ketua Senat UIN Prof Abudin Nata, Sekretaris Senat Prof Armai Arief, Prof Zainun Kamal, Prof Amin Suma, para dekan dan dosen, serta Sekretaris Menteri (Sesmen) Khairul Huda Basyir yang juga sedang menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah.

Sumber : <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/diskusi-relasi-agama-negara-menag-bicara-kesepakatan->

Menag Ingin Indonesia Seperti Arab Saudi

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengungkapkan keinginannya menjadi Indonesia seperti Arab Saudi terkait moderasi agama. Fachrul menilai terjadi perubahan di negara arab, khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab.

Di Arab Saudi, dia melihat ada penguatan relasi antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Hal itu tertuang dalam visi Arab Saudi 2030, di mana penguatan keduanya berada dalam satu kotak yang sama, tidak dipisahkan.

Hal itu disampaikan Menag saat menjadi pembicara kunci pada Rountable Discussion tentang “Pasang Surut Relasi Agama dan Negara”. Diskusi ini digelar Ikatan Alumni UIN (Ikaluin) Syarif Hidayatullah di Ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah, Kamis (23/1).

Menurut dia, Saudi punya pengalaman kurang baik saat memisahkan identitas kebangsaan dan keagamaan. “Saudi saat ini tidak mau memisahkan lagi antara identitas keislaman dan kebangsaan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Kamis (23/1).

Indonesia dari dulu juga begitu, membangun wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi sebuah paket yang tidak terpisahkan. Dia juga bercerita tentang perkembangan moderasi beragama di Uni Emirate Arab. Toleransi menjadi nilai yang dikedepankan hingga banyak sekali wisatawan dan investor yang datang ke sana.

“Wisatawan tidak akan datang kalau masyarakat tidak toleran. Toleransi terus dikampanyekan, tapi hal itu tidak menghilangkan identitas keislaman di sana,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa apa yang diceritakan terkait perubahan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan berarti akan diterapkan di Indonesia. Namun informasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam upaya terus merawat kerukunan dan relasi agama dan negara di Indonesia.

“Kesepakatan, toleransi, dan penegakkan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara ini penting,” katanya.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Karenanya, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan yang penuh toleransi dan berkeadilan. (Aza)

Sumber : <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/23/menag-ingin-indonesia-seperti-arab-saudi>

The screenshot shows a web browser displaying the article on the indonesiainside.id website. The browser's address bar shows the URL: <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/23/menag-ingin-indonesia-seperti-arab-saudi>. The website header includes the logo "Indonesiainside.id" with the tagline "Menebar Inspirasi & Kebajikan". A navigation menu lists categories: HOME, NEWS, EKONOMI, KHAZANAH, METROPOLITAN, SERBA-SERBI, LIFESTYLE, TEKNO, OLAAHRAGA, NARASI, RISALAH, INDEKS. The article title "Menag Ingin Indonesia Seperti Arab Saudi" is prominently displayed, followed by the author "Oleh: Ahmad ZR" and the date "23/01/2020 | 18:03 WIB Nasional". A "BERITA TERKINI" button is visible at the bottom right of the article preview.

Menag Bantah Soal Rencana Atur Isi Teks Khutbah di Masjid

gomuslim.co.id – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membantah soal isu rencana pemerintah untuk mengatur tema atau isi teks khutbah di area masjid-masjid. Ia menegaskan, Kemenag sendiri tidak akan meniru cara Uni Emirat Arab (UEA) dalam mengelola khotbah seperti yang tengah ramai diperbincangkan.

"Saya cerita apa yang ada di negara-negara Arab, tapi kita belum pernah mengadakan perubahan apapun. Kita kan bagus, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melihat orang lain bagaimana. Oh di Saudi, begini, di Emirat Arab begini. Apakah kita akan ubah (red, cara di Indonesia)? Saya enggak pernah bilang untuk mengubah kok," ujar Menag, Kamis (23/1/2020).

Ia pun menjelaskan, pengalamannya saat berkunjung ke negara Arab sengaja diceritakan agar bisa menjadi tambahan pemahaman dan wawasan bagi jajarannya di Kemenag. Namun bukan berarti pihaknya akan mengatur teks khotbah di masjid-masjid Indonesia.

"Sudah pasti, sudah saya bilang kan, saya cerita apa yang ada di negara Arab, tempat lahirnya nabi-nabi, Rasulullah, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab, silakan pahami itu. Enggak pernah saya katakan nanti (red.khotbah) di Indonesia akan begini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menag berbagi cerita soal pertemuannya dengan Kepala Badan Urusan Agama Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed Matar Salem bin Abid Alkaabi di Abu Dhabi (15/12/2019) lalu. Keduanya berdiskusi soal penguatan moderasi beragama dan optimalisasi peran masjid.

Mohammed Matar Salem berbagi kepada Menag RI mengenai informasi kebijakan pemilihan khatib Jumat dan penceramah di negaranya. Menurutnya, ada 3 tipologi khatib dan penceramah.

Pertama, khatib dan penceramah yang diberikan kebebasan untuk berkhotbah atau berceramah tanpa teks. Kedua, khatib dan penceramah yang diberikan kisi-kisi untuk selanjutnya dikembangkan oleh yang bersangkutan saat berceramah.

Ketiga, khatib dan penceramah yang cuma boleh membacakan naskah/teks yang disiapkan dan telah ditashih oleh General Authority of Islamic Affairs and Awqaf (Kementerian Urusan Agama Islam dan Waqaf).

Menag menyebut, pengalamannya saat berkunjung ke negara Arab sengaja diceritakan supaya dapat menjadi tambahan pemahaman dan wawasan bagi jajarannya di Kemenag.

"Udah saya bilang kan, saya cerita apa yang ada di negara Arab, tempat lahirnya Nabi-Nabi, Rasulullah, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab, silakan pahami itu. Enggak pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini," sebut Menag. (mga/kemenag)

Sumber : <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/01/23/17062/-p-menag-bantah-soal-rencana-atu-isi-teks-khutbah-di-masjid-p-.html>



Siap-siap, Kemenag Segera Melaksanakan Program Penceramah Bersertifikat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama akan melaksanakan program penceramah bersertifikat dalam waktu dekat. Namun program ini tidak mengikat dan bersifat opsional.

“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan program penceramah bersertifikat. Program ini tidak mengikat. Bagi yang mau silakan ikut dan yang tidak mau tidak apa-apa,” kata Menteri Agama Fachrul Razi, Kamis (23/1).

Program yang sudah mulai dibahas sejak 2019 lalu itu, menurut Fachrul, bertujuan membekali para penceramah untuk lebih mengenal Pancasila dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam program ini, Kementerian Agama akan melibatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Dia menargetkan proses penyempurnaan program penceramah bersertifikat ini akan selesai bulan depan. “Program ini masih disempurnakan. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai,” ucapnya.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tarmizi Tohor mengatakan program pelatihan penceramah bersertifikat Kemenag bertujuan untuk mencetak kader pendakwah berkarakter moderat, saling menghargai di tengah kemajemukan Indonesia.

Program Penceramah Bersertifikat rencananya akan dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). “Pengkaderan lewat bimtek ini diharapkan dapat melahirkan muballigh yang benar-benar bisa menyampaikan Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Sehingga dapat meningkatkan moderasi kehidupan beragama dan berbangsa,” tutur Tarmizi.

Tarmizi menambahkan program pengkaderan para penceramah bersertifikat ini bertujuan untuk penguatan sekaligus terjaminnya ketersediaan sumber daya dai dengan wawasan kebangsaan yang baik sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran agama.

“Usai mengikuti bimtek para penceramah agama mendapat sertifikat,” tandas Tarmizi. (esy/jpnn)

Sumber : <https://www.jpnn.com/news/siap-siap-kemenag-segera-melaksanakan-program-penceramah-bersertifikat>

The screenshot shows a web browser displaying the JPNN.com website. The main headline is "Siap-siap, Kemenag Segera Melaksanakan Program Penceramah Bersertifikat" with a sub-headline "Kamis, 23 Januari 2020 - 20:23 WIB". Below the headline is a photograph of three men, including Menteri Agama Fachrul Razi. To the right of the main article is a sidebar with a "PERIODE" filter (8 JAM, 12 JAM, 1 HARI, 1 MINGGU) and a list of five news items:

- Dewan Pembina Honoror Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah Honoror ke Pemda
- Dj Wlida Klaim Bakal Jadi Ibu Sambung Gempli, Gading Marten Komentar Begini
- Dj Ini Klaim Diturunkan Tuhan Untuk Membahagikan Gading Marten dan Gempli
- Ternyata Lawan Perdana Timnas U-19 Bukan Seongnam FC
- 5 Berita Terpopuler: Jokowi Tak Pernah Hadiri, Tuntak Nasional Hina

Menteri Agama Tepis Teks Khotbah Jumat Diatur Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengatur teks khotbah Jumat. Fachrul Razi mengatakan dirinya hanya bercerita mengenai praktik keagamaan di negara lain.

"Kita belum pernah mengadakan perubahan apapun. Kita kan bagus kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melihat orang lain gimana. Oh di Saudi, begini, di Emirat Arab begini. Apakah kita akan ubah? Saya nggak pernah bilang untuk mengubah kok," kata Fachrul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Hal ini disampaikan Menteri Agama menanggapi pemberitaan di sejumlah media bahwa Kementerian Agama Kota Bandung berencana mengatur teks khotbah Jumat. Fachrul menegaskan bahwa rencana itu bukan merujuk pada instruksinya.

Fachrul mengaku, hanya bercerita pengalaman selama kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu kepada jajarannya. Ia bercerita bahwa khotbah salat Jumat di dua negara tersebut menggunakan teks yang telah disiapkan pemerintah.

Namun, mantan Wakil Panglima TNI itu menyebut, tidak ada rencana Kementerian Agama untuk menerapkan apa yang sudah berjalan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sumber : <https://www.kompas.tv/article/63629/menteri-agama-tepis-teks-khotbah-jumat-diatur-pemerintah>

The screenshot shows a web browser window displaying a news article on the Kompas TV website. The article title is "Menteri Agama Tepis Teks Khotbah Jumat Diatur Pemerintah". The page layout includes a navigation bar with categories like HOME, LIVE TV, NASIONAL, REGIONAL, INTERNASIONAL, SPORT, BISNIS, SUCI, KLIK360, TALKSHOW, TRAVEL, RELIGI, and KULINER. Below the article title, there is a video player and a "VIDEO TERPOPULER" section. The video player shows a thumbnail of a man in a black cap. The "VIDEO TERPOPULER" section lists three videos: "Kelabui Perempuan Untuk Dinkahi Siri, TNI Gadungan Ditangkap", "Erick Thohir Minta Triawan Munaf Perbaiki Citra Garuda Indonesia", and "Geger Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Ma'rif Amin: Harus Diaran...". The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 1/24/2020 and time 10:30.

Tiga Tahun Revitalisasi Kantor Urusan Agama

Jakarta (Kemenag) --- Pimpinan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah telah berganti. Mohsen diganti oleh Muharram sebagai Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Selanjutnya, Mohsen bertugas sebagai Kepala biro Administrasi Umum, Akademik Kemahasiswaan IAIN Palu.

Pisah sambut keduanya digelar Rabu (22/01) di kantor Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama. Hadir, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Mohammad Agus Salim, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Banten Teguh Sarwono, serta seluruh pejabat dan pegawai pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Tiga tahun menjadi Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang merupakan direktorat baru pada Ditjen Bimas Islam, cukup banyak pencapaian ayah empat putri dan satu putra ini. Melalui program Paradigma Baru Layanan KUA Kecamatan, Mohsen melakukan sejumlah revitalisasi.

Pertama, revitalisasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini bahkan ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah dalam bidang pembangunan manusia. Termasuk di dalamnya program Pusaka Sakinah (pusat keluarga sakinah). Kedua, revitalisasi gedung KUA. Sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai 708 unit Balai Nikah dan Manasik Haji KUS yang dibangun melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tahun ini, ditargetkan ada pembangunan 128 gedung KUA. Bahkan mulai tahun 2020, pembelian lahan buat gedung KUA juga dianggarkan dari dana SBSN.

Dalam layanan pencatatan nikah, revitalisasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, yakni dengan dihadirkannya SIMKAH WEB yang terintegrasi dengan data Dukcapil dan adanya Kartu Nikah sebagai dokumen tambahan selain Buku Nikah yang diterima oleh masyarakat. Sejumlah penghargaan pun telah diterima Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, di antaranya dalam layanan pencatatan nikah di luar negeri yang menerima penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award Tahun 2019 kategori Mitra Kementerian Luar Negeri. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dinilai membantu memudahkan WNI di luar negeri yang hendak menikah.

Revitalisasi keempat dalam bidang transparansi layanan. Indeks layanan KUA pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016, yakni 80.40. Oleh Ombudsman RI terdapat tiga layanan KUA yang memperoleh nilai sangat tinggi yaitu Legalisasi Kutipan Akta Nikah, Legalisasi Surat Keterangan Nikah Luar Negeri, dan Layanan Nikah di KUA dengan perolehan skor 97.50.

Terakhir, revitalisasi dalam bidang pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM penghulu. Hal ini ditandai dengan penambahan jumlah penghulu, dari 3.000 an pada tahun 2015 kini sudah mencapai 8.336 orang yang tersebar di 5.945 KUA. Tahun ini rencananya akan dibuka jalur inpassing ke dalam jabatan fungsional penghulu, sehingga kebutuhan SDM penghulu kian terpenuhi.

Dalam periode kepemimpinan Mohsen, sejumlah regulasi juga berhasil dirampungkan dan diterbitkan, di antaranya regulasi tentang jabatan fungsional penghulu, pencatatan pernikahan, pedoman pendirian gedung balai nikah dan manasik haji, biaya operasional KUA dan lain sebagainya.

Di akhir pertemuan tersebut, Mohsen menyampaikan filosofi hidupnya yang juga menjadi prinsipnya dalam pekerjaan "Saya yang pertama bukan yang lebih baik, tapi lebih baik jadi yang pertama dari pada jadi yang lebih baik." Saatnya Direktur baru untuk bekerja dan terus berinovasi, meningkatkan layanan KUA bagi masyarakat. (Insan Khoirul Qolbi)

Sumber : Bina KUA

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512633/tiga-tahun-revitalisasi-kantor-urusan-agama>

Menag Minta PTKIN Fokus Cetak Generasi Unggul

daulat.co – Menteri Agama Fachrul Razi menerima 40 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menag mengingatkan agar PTKIN fokus mencetak generasi yang unggul dan bernasionalisme tinggi.

“Kita lahirkan pemimpin-pemimpin nantinya yang memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang terpuji, dan tentu mencintai bangsa dan negara,” ucap Menag di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/01).

Menag juga minta dana negara yang didistribusikan untuk PTKIN dikelola dengan baik agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai aturan. “Presiden berpesan, uang ini kita cari dengan susah payah, saya harapkan betul-betul jangan ada kebocoran, dimanfaatkan dengan baik dan betul-betul ada hasilnya,” ujar Menag.

Menag mengaku akan mengundang para pemenang tender pembangunan UIN. Menag akan menegaskan bahwa terpilihnya mereka sebagai pemenang lelang bukan karena siapa-siapa, tapi melalui proses yang terbuka dan sesuai ketentuan.

“Pemenang lelang tidak berhutang budi sedikit pun kepada saya sebagai Menteri Agama, Dirjen-Dirjen, dan pejabat lainnya. Pemenang lelang tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Tapi mereka berhutang budi kepada bangsa ini,” tegas Menag.

Ketua Forum Rektor Babun Suharto, berharap ada pemerataan alokasi dana SBSN ke seluruh PTKIN. Menurutnya, dana SBSN yang sudah berjalan lima tahun belakangan amat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan PTKIN.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar hasilnya maksimal bagi kemajuan PTKIN.

Sumber : <http://daulat.co/menag-minta-ptkin-fokus-cetak-generasi-unggul/>



Menag Ingatkan Pimpinan PTKIN Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis

nusakini.com-Jakarta- Menteri Agama Fachrul Razi menerima 40 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menag mengingatkan agar PTKIN fokus mencetak generasi yang unggul dan bernasionalisme tinggi.

“Kita lahirkan pemimpin-pemimpin nantinya yang memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang terpuji, dan tentu mencintai bangsa dan negara,” ucap Menag di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/01).

Menag juga minta dana negara yang didistribusikan untuk PTKIN dikelola dengan baik agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai aturan. “Presiden berpesan, uang ini kita cari dengan susah payah, saya harapkan betul-betul jangan ada kebocoran, dimanfaatkan dengan baik dan betul-betul ada hasilnya,” ujar Menag.

Menag mengaku akan mengundang para pemenang tender pembangunan UIN. Menag akan menegaskan bahwa terpilihnya mereka sebagai pemenang lelang bukan karena siapa-siapa, tapi melalui proses yang terbuka dan sesuai ketentuan.

“Pemenang lelang tidak berhutang budi sedikit pun kepada saya sebagai Menteri Agama, Dirjen-Dirjen, dan pejabat lainnya. Pemenang lelang tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Tapi mereka berhutang budi kepada bangsa ini,” tegas Menag.

Ketua Forum Rektor Babun Suharto, berharap ada pemerataan alokasi dana SBSN ke seluruh PTKIN. Menurutnya, dana SBSN yang sudah berjalan lima tahun belakangan amat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan PTKIN.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar hasilnya maksimal bagi kemajuan PTKIN.(p/ab)

Sumber : <http://www.nusakini.com/news/menag-ingatkan-pimpinan-ptkin-cetak-generasi-unggul-dan-nasionalis>

The screenshot shows a web browser displaying the news article on the nusakini.com website. The article title is "Menag Ingatkan Pimpinan PTKIN Cetak Generasi Unggul dan Nasionalis". The text of the article is visible, including the quote from Menag: "Kita lahirkan pemimpin-pemimpin nantinya yang memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak yang terpuji, dan tentu mencintai bangsa dan negara." The page also features social media sharing buttons for Facebook, Twitter, Google+, and Pinterest. On the right side, there is a "POPULER TERKINI" section with several news items, such as "Kalahkan AS Roma 3-1, Juventus Tembus Semifinal Coppa Italia" and "Perusahaan Penyedia Layanan Komputasi Awan asal AS Minat Investasi di RI". The browser's address bar shows the URL: "www.nusakini.com/news/menag-ingatkan-pimpinan-ptkin-cetak-generasi-unggul-dan-nasionalis".

Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

● FAUZIAH MURSID

Gerakan *One Pesantren One Product* diharapkan berkembang di berbagai provinsi.

JOMBANG — Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendorong kemandirian ekonomi umat melalui santri-santri di pesantren. Wapres pun mendorong para santri diajarkan tentang wirausaha dan tren digital saat ini.

"Saya harapkan kepada pelajar dan santri mampu menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat, dan pesantren itu sendiri agar mampu mencapai kemandirian ekonomi, sosial dan juga memacu pengembangan *skill* teknologi produksi, distribusi, pemasaran," kata Wapres saat membuka Rakernas Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Gelar Karya Santri Nusantara, Santri Digital Fest, di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (23/1).

Wapres menilai, para santri dan pelajar ikut berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren. Karena itu, santri bisa turut serta dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia melalui semangat berwirausaha sejak dini.

Adapun salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren adalah program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Wapres me-

nilai, OPOP sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang berbasis kolaborasi antara pelaku ekonomi kuat dan lemah.

"Pilar OPOP adalah sinergi antara koperasi pondok pesantren, forum bisnis, pengusaha alumni pesantren, dan *socialpreneur*," kata dia.

Ekosistem pengembangan OPOP menggunakan metode antara lain pelatihan, *mentoring*, fasilitas pemasaran, dan fasilitas permodalan. Saat ini, OPOP Training Center telah didirikan di Universitas NU Surabaya. Jaringan program ini terdiri atas kementerian, BUMN, perusahaan swasta, organisasi internasional, dan lembaga pendidikan.

Wapres menyebutkan, sejumlah pesantren besar di Jatim telah tergabung dalam program OPOP di antaranya Pesantren Sunan Drajat (Lamongan), Langitan (Tuban), Sidogiri (Pasuruan), Amanatul Ummah (Mojokerto), Gontor (Ponorogo), al-Hikam (Malang), Nurul Jadid (Probolinggo), an-Nuqoyyah, al-Amin (Sumenep), dan Blok Agung (Banyuwangi).

Menurut Wapres, pilar OPOP Jatim bukan hanya individu santri menjadi *santripreneur*, melainkan juga institusi pesantren menjadi *pesantrenpreneur*, dan alumni pesantren yang sebarannya sangat luas dan jumlahnya terus bertambah menjadi *sosipreneur*.

"Muaranya adalah menghasilkan produk sesuai standar syariah dan halal, yang diterima pasar, berdaya saing, dan berbasis ekonomi digital," ujar dia.

Gerakan OPOP yang digulirkan Pemprov Jatim pada 2019, ditargetkan pada 2023 nanti mampu menciptakan satu juta *santripreneur* dan 1.000 produk unggulan (barang atau jasa). Wapres berharap, gerakan semacam OPOP ini berkembang di provinsi-provinsi lain. Saat ini, selain di Jatim, pro-

gram OPOP juga berkembang dinamis di Jawa Barat sejak 2018.

Gerakan ekonomi pesantren sudah lama berlangsung. Bila gerakan ini terus digerakkan, didampingi, difasilitasi, dan dikolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, ia yakin, hal itu akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga meninjau Pameran "Gelar Karya Santri Nusantara". Pameran ini diikuti 20 *santripreneur* dari SMK Mini yang berada di bawah naungan pondok pesantren, 20 *pesantrenpreneur* dari perwakilan koperasi pesantren, dan 20 *sociopreneur* alumni pesantren yang punya usaha. Mereka terpilih dari seluruh Jatim yang terbina melalui OPOP.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Koperasi Teten Masduki, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.

Pada kesempatan itu, Khofifah berpesan agar anak muda, tak terkecuali para kader IPPNU, berhati-hati berada di lingkungan anak muda era *post truth*. Pada era ini, menurut dia, siapa pun harus memiliki kewaspadaan luar biasa.

Dalam era industri *e-commerce*, lanjut Khofifah, peta kompetisi luar biasa dengan membanjirnya produk luar negeri. Maka, ia pun mengajak santri dan pesantren untuk menghadapi persaingan ketat ini dan beradaptasi dengan percepatan teknologi.

"Kita ingin Wapres memotivasi IPPNU dengan potensi luar biasa, harapannya tumbuh Nahdlatul Tujjar, baik *online* atau *offline* dengan sinergitas dan semangat yang NKRI-nya harga mati," ujar Khofifah melalui keterangan tertulis. ■ ed: wachidah handasah

Fraksi DPR Tampung Masukan Omnibus Law

● ERDY NASRUL
FAUZIAH MURSID

JAKARTA -- Fraksi-fraksi di DPR RI berjanji menampung dan mengakomodasi masukan publik dalam pembahasan *omnibus law* RUU Cipta Lapangan Kerja dengan pemerintah. Direncanakan, draf RUU tersebut diserahkan kepada DPR pada pekan depan.

DPR telah menetapkan 50 RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk 2020, salah satunya RUU Cipta Lapangan Kerja. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rabu (22/1).

Indepth

Sederhanakan
Sertifikasi Halal

Hlm-9

ta Lapangan Kerja.

Dia mengatakan, PAN akan melakukan kajian secara mendalam draf RUU serta masukan-masukan yang ada untuk menentukan sikap terhadap *omnibus law*. Kendati demikian, ia tak menjelaskan masukan apa yang diterima PAN terkait *omnibus law*.

"Intinya, kalau kami nilai banyak mendaratkan mudharat, tentu akan kami tolak. Tapi

sebaliknya, jika membawa manfaat, kami akan mendukung," kata Saleh, Kamis (23/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya akan mengawal pasal-pasal di *omnibus law* agar tetap selaras dengan semangat Pancasila. "Ini supaya *omnibus law* jadi pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Arwani mengatakan, DPR sampai saat ini belum menerima draf RUU terkait *omnibus law*. Menurut dia, draf masih berada di tangan pemerintah.

Berdasarkan jadwal, draf akan diserahkan pada awal pekan depan. Setelah itu, kata dia, DPR akan mulai mengkaji setiap pasal dalam RUU.

"Kami akan pastikan per-

aturan yang disahkan mendukung kemaslahatan bangsa. Kami juga akan menyerap aspirasi masyarakat luas. Apa yang menjadi harapan mereka akan mewarnai dinamika pembahasan kami dalam proses legislasi," kata Arwani.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, draf omnibus law bakal diserahkan pemerintah kepada DPR pada Senin (26/1). Dia memastikan DPR akan segera membahas omnibus law setelah menerima draf resmi dari pemerintah.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sebelumnya menegaskan, pemerintah terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait draf RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih mengkaji secara isi draf RUU secara saksama.

"Pemerintah selalu mendengar berbagai pihak, melakukan dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha dan pihak-pihak yang terlibat," ujar Kiai Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Olah karena itu, Kiai Ma'ruf memastikan penyusunan RUU Omnibus Law harus didasari kesepakatan semua pihak, bukan sepihak dari pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Ma'ruf sekaligus untuk membantah anggapan bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa terhadap penyusunan RUU terkait *omnibus law*.

Kami akan pastikan aturan yang disahkan mendukung kemaslahatan bangsa. Kami akan menyerap aspirasi masyarakat luas.

Kendati demikian, Kiai Ma'ruf mengamini pemerintah ingin draf segera diselesaikan. "Itu kan keinginan. Maksudnya supaya cepat, tapi realisasinya bergantung pembicaraan di DPR. Saya

sih mengharapkan kalau cepat, bagus, artinya kita sudah mengantisipasi hal-hal yang selama ini jadi hambatan terutama dalam proses investasi, tenaga kerja, perpajakan," katanya.

Sebelumnya, ratusan buruh yang melakukan aksi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu, menyoroti penyusunan RUU Omnibus Law yang dinilai terlalu terburu. Mereka meminta pemerintah dan DPR tak tergesa-gesa dan berharap dilibatkan dalam penyusunannya. Apalagi, mereka menilai ada beberapa poin yang dianggap akan merugikan buruh dalam RUU Cipta

Lapangan Kerja. Salah satunya soal kemungkinan diberlakukannya upah per jam.

Dampak UKM

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, aturan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja akan menumbuhkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, para pelaku usaha tidak lagi terbebani kewajiban pemberian upah minimum.

"Sekarang ini orang bingung, upah minimum di Jakarta sudah Rp 4,2 juta. Kalau UKM disuruh bayar Rp 4,2 juta untuk pekerjanya, saya nggak yakin mereka bisa, tapi aturannya begitu," ujar Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, Kamis (23/1).

Ia mengaku belum tahu isi RUU Cipta Lapangan Kerja. Hanya saja, dirinya yakin UKM akan menjadi sektor yang paling menikmati aturan tersebut.

"Misalnya UKM dibebaskan dari upah minimum, otomatis mereka bisa lakukan itu (bayar pekerja sesuai kemampuan), karena undang-undangnya membolehkan. Kalau sekarang bisa jadi masalah," ujar dia.

Jika hal tersebut terealisasi, ia berpendapat akan ada transformasi besar-besaran di UKM. "Bicaranya sudah padat karya dan penyerapannya sangat besar sekali," kata Hariyadi.

Selain itu, ia menilai omnibus law bakal mendorong banyak UMKM naik kelas. Alasannya, kemampuan pelaku usaha meningkat, sehingga omzetnya pun bertambah.

"Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan jumlah pelaku UMKM sekarang sekitar 60 jutaan, tapi mereka tidak dalam posisi solid dari sisi kemampuan usaha. Mungkin dengan ini usaha mereka bergerak dari mikro menjadi kecil, kecil ke menengah," kata dia.

■ fabrianto adi saputro/iit septyaningsih
ed: satria kartika yudha

Sederhanakan Sertifikasi Halal

● FUJI EKA PERMANA

JAKARTA — Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi salah satu UU yang akan terdampak *omnibus law* RUU Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah ingin memperbaiki sejumlah aturan dalam UU JPH guna memudahkan proses sertifikasi halal.

Founder Halal Corner Aisha Maharani mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah penyederhanaan sistem sertifikasi halal. Menurut dia, proses sertifikasi halal saat ini terdiri atas tiga pintu, mulai dari tahap pendaftaran sampai dikeluarkannya sertifikat.

Aisha mengatakan, sistem tiga pintu membuat pelaku usaha bolak-balik ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ia berharap sistem itu dapat diperbaiki agar pengurusan sertifikasi halal semakin cepat.

Berdasarkan UU JPH, pelaku usaha harus mendaftarkan sertifikasi halal ke BPJPH. Setelah mendapat surat rekomendasi dari BPJPH, pelaku usaha daftar ke lembaga pemeriksa halal (LPH) yang ditunjuk.

"Sekarang LPH yang baru bisa bekerja adalah LPPOM MUI

Di LPPOM nanti diaudit, setelah audit ke BPJPH lagi, kemudian ke MUI lagi untuk difatwakan. Kemudian ke BPJPH lagi, baru keluar sertifikat halal," kata Aisha kepada *Republika*, Kamis (23/1).

Ia menceritakan, berdasarkan pengalaman mendampingi perusahaan yang melakukan sertifikasi halal di LPPOM MUI, prosesnya membutuhkan waktu 75 hari kerja dari mulai pendaftaran sampai keluar sertifikat halal. Tapi, kalau perusahaan sudah paham dan siap serta memiliki konsultan, sertifikasi halal bisa selesai dalam waktu satu bulan.

Namun, apabila perusahaan atau pelaku usaha tidak tahu tentang sertifikasi halal, prosesnya akan amat lama. Ini karena saat dilakukan audit, pasti ada hal-hal yang diminta untuk diperbaiki. Apalagi, menurut dia, persyaratan melakukan sertifikasi halal saat ini semakin banyak.

"Dulu syaratnya izin usaha dari RT/RW dan kelurahan sudah cukup. Sekarang, harus ada NPWP, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain. Banyak banget," ujarnya.

Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan, pelaku usaha harus diberikan

edukasi tentang sertifikasi halal agar prosesnya cepat. Sebelum mengajukan sertifikasi, pelaku usaha harus paham betul cara memproduksi produk halal.

"Selain itu, akan lebih mudah dan cepat prosesnya kalau kehalalan bahan baku sudah terjamin," katanya.

Ia menjelaskan, jika seorang penjual bakso menggunakan daging yang belum disertifikasi halal, daging itu harus ditelusuri kehalalannya. Harus dipastikan pula hewan yang dagingnya dijadikan bahan baku, disembelih dengan cara halal. Selain itu, auditor halal akan menelusuri, apakah dagingnya digiling di penggilingan yang khusus melayani daging halal tanpa bercampur dengan daging yang tidak halal.

Muti menyampaikan, proses sertifikasi halal di LPPOM MUI rata-rata memakan waktu selama 40 hari kerja. Proses sertifikasi halal paling cepat selama dua pekan kalau pelaku usahanya sudah sangat paham persyaratan. Tapi ada juga proses sertifikasi halal yang membutuhkan waktu sangat lama jika bahan yang digunakan banyak dan sulit ditelusuri kehalalannya.

■ ed: satria kartika yudha

KUII ke-7 Digelar di Bangka Belitung

▣ Bahas Persoalan Umat

DALAM waktu dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung, akhir Februari nanti.

Kegiatan yang dihadiri seluruh Ormas Islam seluruh Indonesia itu akan dibahas berbagai persoalan umat, mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun agama. Sebagai agenda pra Rakernas, MUI mengundang beberapa pihak dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas masalah ekonomi.

Dalam FGD hadir pembicara dari empat lembaga, antara lain Vice President Tokopedia Astri Wahyuni, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati, serta anggota Dewan Syariah Nasional, Gunawan Yasni.

Dalam pemaparannya, Enny Hartati mengungkapkan bahwa perlu ada fokus dalam kebijakan ekonomi sekarang ini. Sekalipun pemerintah sudah

memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, namun masyarakat yang dasar seringkali tidak fokus.

ORANG SAMA

Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, kata dia, justru selama ini hanya dinikmati orang-orang yang sama. Kalangan bawah tetap saja tidak bisa menikmati fasilitas itu. Bahkan setelah ada kredit ultra mikro, nyatanya tidak membuka kesempatan kalangan ekonomi bawah bisa

menerima akses. Karena itu, dia menekankan kebijakan ekonomi yang muncul harus proporsional.

"Perlu ada langkah proporsional dulu, termasuk dalam menyebut Mikro, Kecil, dan Menengah karena rentang Mikro dan Menengah sangat jauh, sehingga kebijakan yang muncul bisa fokus pada proporsinya," kata dia di Gedung MUI Pusat, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Dadang Muljawan memaparkan

bahwa akses pendanaan yang ada selama ini memang masih sulit didapatkan. Namun, kata dia, walaupun ada, dana tersebut harus dimanfaatkan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Cara itu, imbuh dia, bisa membuat defisit neraca berjalan Indonesia tidak terjadi lagi.

"Saat ini current account defisit Indonesia belum sembuh, dari dulu Indonesia banyak mengucap, namun belum banyak berbuat yaitu mencintai produk dalam negeri," kata dia. (johara/bu)

Program Penceramah Bersertifikat

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) tetap akan menggelontorkan program penceramah bersertifikat. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bilang mereka yang mau ikut saja.

Peliput:Johara

Mantan wakil panglima ini mengatakan program ini tidak mengikat dan bersifat opsional. "Dalam waktu dekat kita akan mengadakan program penceramah bersertifikat. Program ini tidak mengikat. Bagi yang mau silahkan ikut dan yang tidak mau tidak apa apa," ujar Menag, di Batam, kemarin.

Program yang sudah mulai dibahas sejak 2019 lalu ini, sejatinya menurut dia, bertujuan membekali para pence-

ramah untuk lebih mengenal Pancasila dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LIBATKAN

"Dalam program ini, Kementerian Agama akan melibatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," jelas Fachrul.

Fachrul menargetkan proses penyempurnaan

Fachrul Razi: Yang Mau Saja

program penceramah bersertifikat ini akan selesai bulan depan. "Program ini masih disempurnakan. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai," kata

Menag.

Sementara, ditemui terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tarmizi Tohor mengata-

kan program pelatihan penceramah bersertifikat Kementerian Agama bertujuan untuk mencetak kader pendakwah berkarakter moderat, saling menghargai di tengah kemajemukan Indonesia.

Tohor menyampaikan, pada Maret 2019, Kemenag bersama dengan MUI telah menggelar Penguatan Kader Muballigh Tingkat Nasional 2019. Gelaran yang mengusung tema "Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" ini, diikuti oleh perwakilan MUI dari seluruh provinsi di Indonesia.

(bu)



Fachrul Razi

2020, BPKH Target Kelola Dana Haji Rp132 Triliun

JAKARTA-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus bekerja maksimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. 2020 ini, BPKH menargetkan mengelola dana haji sebesar Rp132 triliun dan nilai manfaat Rp8 triliun. Target



ANTARANEWS.COM
Anggito Abimanyu

ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sebesar Rp125 triliun dengan nilai manfaat mencapai Rp7,2 triliun.

"Kenaikan dana kelolaan ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar untuk investasi," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu

di Jakarta, kemarin.

Selain itu di tahun 2020 ini, BPKH juga mendorong pembayaran digital untuk *living cost* jemaah haji salah satunya meningkatkan penggunaan *cashless*. *Virtual Account* yang saat ini masih sebatas informasi dan distribusi Nilai Manfaat (NM) jemaah tunggu, diharapkan dapat juga digunakan sebagai media *cashless* dan *source of fund eWallet* atau *eMoney*.

Menurut Anggito, ada beberapa poin penting terkait pengelolaan keuangan haji tahun ini. Antara lain: peningkatan dana kelolaan melalui program "Ayo Haji Muda"; proses digitalisasi haji dan umrah; kerja sama kelembagaan dengan institusi dalam negeri dan luar negeri; dan diversifikasi portofolio Syariah akan terus diupayakan dengan pendalaman *instrument*.

Dia menyebutkan, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPKH terus mendorong kampanye pentingnya haji di usia muda, karena sebagian besar aktivitas ibadah haji adalah kegiatan fisik.

"Dengan kampanye "Ayo Haji Muda" diharapkan generasi muda atau kaum milenial semakin sadar akan pentingnya ibadah haji dan mendaftarkan dirinya untuk berangkat haji sejak dini," kata Anggito. (sr/15)

OMNIBUS LAW RUU

Harus Ada Penyederhanaan Proses Sertifikasi Halal

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdullah mengatakan, adanya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menghapus sejumlah pasal di beberapa UU. Di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal maka harus ada penyederhanaan dan kepastian waktu saat berproses untuk mendapatkan sertifikasi halal.

"Harus ada kepastian hukum. Kalau namanya sertifikasi halal selesai misalnya 2 minggu maka harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Jangan sampai selesai dalam waktu sebulan," kata Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Ikhsan, harus ada penyederhanaan dan kepastian waktu proses sertifikasi halal. Karena ketika produk mendapatkan sertifikasi halal merupakan bagi pelaku usaha. Apalagi untuk mendapatkan kepastian halal juga sudah menjadi gaya hidup atau life style bagi semua orang. Sehingga mendapatkan kepastian halal bukan hanya untuk umat muslim saja.

"Saya kira itu agar mereka benar-benar mendukung proses sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal penting untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat konsumen. Apalagi produk halal sudah menjadi lifestyle, menjadi kebutuhan hidup masyarakat modern," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Ikhsan tidak setuju jika proses mendapatkan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya atau gratis. Karena jika gratis maka kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap produk halal akan hilang. Sehingga marwah atau kesakralan halal akan tidak ada artinya.

Oleh karena itu proses mendapatkan sertifikasi harus tetap dikenakan biaya. Soal berapa biaya yang dikeluarkan maka tergantung produk atau jenisnya. "Kalau digratiskan filosofi halal bisa hilang. Sehingga tidak ada awareness (kesadaran) dengan yang dimilikinya," ungkapnya.

Diketahui, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki mengakui, Kementerian Agama (Kemenag) telah dilibatkan dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU tersebut akan menghapus sejumlah pasal di beberapa UU. (nas)